



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073

PONTIANAK

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dislautkan@kalbarprov.go.id Kode Pos : 78116

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Gubernur Kalimantan Barat
Dari : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
Tanggal : 4 Februari 2020
Nomor : 523. 835/ 123/ DKP-UPT PBAPL.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kajian Teknis Tentang Keberadaan dan Nomenklatur UPTD - Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) Provinsi Kalimantan Barat.

I. DASAR PERTIMBANGAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudidaya Nelayan,Pembudidaya Ikan,dan Petambak Garam;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pelasana teknis Perikanan Air Tawar,Perikanan Budidaya Air Payau dan Perikanan Budidaya Laut;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi,kodepikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pembentukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT- Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 47 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional di Bidang Pengembangan Ikan – Ikan Specific Lokal;

II. PERSOALAN :

Kalimantan Barat mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, baik dari penangkapan maupun budidaya perikanan. Dengan garis pantai sepanjang 1.398 km dan luas wilayah laut sebesar 52.271 km², maka sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat merupakan salah satu sektor yang perlu dikembangkan dalam pembangunan di Kalimantan Barat.

Perikanan budidaya di Kalimantan Barat juga memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Sektor perikanan budidaya ini jika dikelola dengan baik akan bisa digunakan sebagai motor penggerak perekonomian dan penyerap tenaga kerja. Potensi perairan yang bisa dikembangkan diantaranya adalah perairan payau (tambak) dan perairan laut (sampai dengan 12 mil). Selain itu produksi budidaya dalam renstra Dinas Kelautan dan perikanan tahun 2019 - 2024 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas yang akan mempengaruhi tujuan capaian RPJMD tahun 2019 - 2024.

Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat khususnya, potensi perikanan air payau mencapai 74.301,06 ha yang tersebar di Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang. Potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 6.787,24 ha, sehingga masih berpeluang untuk dikembangkan sebesar 67.513,82 ha. Sedangkan potensi pengembangan usaha perikanan budidaya laut mencapai 13.047,24 ha, baru dimanfaatkan 28,76 ha, dengan demikian peluang pengembangannya mencapai 13.018,05 ha. Sedangkan beberapa komoditas unggulan yang dapat dikembangkan diantaranya udang, rumput laut, ikan bandeng, kerapu, kakap, udang, kekerangan, kepiting, ranjungan, dan bawal bintang.

Bahwa Saat ini Kebutuhan pembudidaya ikan terhadap Calon Induk, benih ikan/benur udang tawar, payau, dan laut sebagaimana dimaksud belum dapat diikuti oleh pertumbuhan produksi benih ikan/benur udang tawar, payau, dan laut oleh para pelaku usaha masyarakat pembenihan ikan/udang di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pembenih ikan/udang, diantaranya:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki masyarakat sehingga produksi benih/benur tidak optimal, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Minimnya permodalan, pengetahuan dan ketrampilan serta wawasan para pelaku usaha pembenihan ikan/udang dalam perkembangan ilmu dan teknologi perbenihan.

Jumlah kebutuhan benur di Kalimantan Barat per tahunnya diperkirakan berkisar antara 150.000.000-250.000.000 ekor. (*berdasarkan data Existing luas lahan tambak yg sudah dimanfaatkan di Kalimantan Barat*).

Guna memenuhi kekurangan suplai benih ikan/udang di Provinsi Kalimantan Barat maka para pembudidaya ikan/udang masih mendatangkan benih/benur dari luar Kalimantan Barat Yang harganya lebih mahal dan mudah mati/stress karena pengaruh jarak pengangkutan.

Kondisi yang telah dipaparkan di atas tentunya sangat diperlukannya Keberadaan Unit PPeaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT – PBAPL) dalam rangka memenuhi kebutuhan Calon Induk ,Benih/Benur di masyarakat pembudidaya yang dapat menciptakan “ Multifier Effect” Perekonomian Masyarakat dan juga sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL) Provinsi Kalimantan Barat, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui kegiatan rutin maupun program pembangunan mempunyai tugas **“Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dibidang perikanan budidaya air payau dan laut serta ikan-ikan spesifik lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**,

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : **91 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 TENTANG Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPT- Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL)**, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Kerja UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut.
2. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan asset.
3. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang produksi dan distribusi.
4. Kegiatan Teknis operasional dibidang pelayanan jasa teknologi.
5. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyediaan induk dan benih unggul ikan air payau dan laut yang bersertifikasi.
6. Pelaksanaan kegiatan teknis penerapan hasil pengembangan aplikasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut.
7. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pengujian laboratorium secara mikrobiologis, organoleptik, kimia dan fisika terhadap kualitas air dan lingkungan budidaya air payau dan laut.
8. Pelaksanaan pelayanan teknis perbenihan dan budidaya air payau dan laut.
9. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan ikan-ikan spesifik lokal.
10. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pelayanan teknis sertifikasi mutu benih ikan air payau dan laut.
11. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di Bidang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut.

12. Pelaksanaan Tugas lain di Bidang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL) Provinsi Kalimantan Barat, perlu menambahkan salah satu fungsi yaitu *Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang Pengembangan ikan-ikan spesifik lokal*, sebagaimana

yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 47 Tahun 2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor : 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPT-Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL). Dengan adanya penambahan satu fungsi sebagaimana tersebut diatas maka UPT- Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL) bukan hanya menangani teknis produksi benih dan pembesaran pada jenis komoditas ikan air payau dan laut saja seperti *Udang Windu, Udang Pannamei, udang galah, Ikan Bandeng dan Ikan Nila Salin* yang proses produksinya dilakukan di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan di Kecamatan Sebangkau Kabupaten Sambas, tetapi juga menangani teknis produksi jenis komoditas ikan-ikan spesifik lokal seperti : *Jelawat, Tengadak, Kelabau, Tambakan, belidak, gurame, semah dan Baung* dimana dari mulai proses Domestikasi sampai dengan proses produksi benih di lakukan di Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah, maka provinsi dapat menangani urusan budidaya tawar, payau dan laut sehingga antara Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2018 tanggal 06 Juli 2018 dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut adalah **selaras** pada Permendagri tersebut urusan yang ditangani UPT Provinsi dibidang Budidaya salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaannya Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau mamfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaannya Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau mamfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

III. PRAANGGAPAN.

Dalam rangka pencapaian Penyediaan kebutuhan induk Ikan, calon induk Ikan, Benih Ikan dan benur Udang (Air Tawar, Payau dan Laut) pada Masyarakat Pembudidaya di Provinsi Kalimantan Barat maka diperlukan dasar hukum dan Perundang – undangan yang berlaku terkait Keberadaan dan Nomenklatur UPT – Perikanan Budidaya yang sesuai dengan dasar hokum dan Perundang – Undangn yang berlaku dan terbaru.

IV. FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI PERSOALAN :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Salah satu modal utama dalam pengembangan sektor perikanan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang mandiri, tangguh, dan berdedikasi tinggi serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan baik formal maupun nonformal. UPT- Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) mempunyai peran yang strategis dalam peningkatan SDM sebagai perpanjangan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dimana selama ini selain memproduksi calon induk dan jenis ikan/udang juga sudah banyak memberikan Pelatihan dan Pendampingan mulai dari Kelompok Petani Budidaya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi (Mahasiswa), dan Petugas Perikanan dari Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Barat.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Dengan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana di UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut berdampak pada peningkatan produksi sehingga potensi retribusi Pendapatan Asli Daerah yang sudah ditarget belum tercapai pada tahun 2019

Pembiayaan Sarana dan Prasarana selain bersumber dari APBD juga dapat dipenuhi dari DAK (Dana Alokasi Khusus).

V. ANALISIS

1. Kebaradaan Asset

- Lahan 1 : Mempunyai luas 36.435. m². Terletak di Jl. Malindo kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Provinsi Kalimantan Barat status pinjam pakai dengan Pemkot Singkawang sesuai dengan surat Keputusan Nomor 030/ 164/BKD –ASSET.B Tahun 2018, dan masih dalam Proses Permohonan hibah dari Pemerintah Kota Singkawang.
- Lahan 2 : Mempunyai luas 35.583. m². Lahan ini adalah Tambak air payau dan laut dan peruntukannya adalah untuk pembesaran udang, ikan bandeng dan ikan nila salin, dan terletak di Dusun Sungai Mas Desa Sebatuan Kec.Pemangkat Kab.Sambas Sertifikat
- Lahan 3 : terletak di Jln. Terusan RT/RW. 024/17 Mempawah hilir luas total 4.974 m² Sertifikat Tanah Nomor .HP/BPN/61.02/2 Tahun 2015
- Lahan ditepi sungai ini selama ini peruntukannya adalah untuk Karamba Jaring Apung (KJA) untuk pembesaran calon/induk ikan- ikan spesifik lokal.
- Lahan 4 dan 5 : Mempunyai luas total 3,60 Ha, dengan luas kolam efektif 3,0 Ha, dengan tekstur tanah lempung liat berpasir dengan topografi datar agak miring dengan ketinggian ± 20 m diatas permukaan laut. Lokasi ini terletak di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah atau ± 70 Km dari Kota Pontianak dan berada di pinggir jalan antar negara (Pontianak–Kuching Sarawak Malaysia). Peruntukannya adalah untuk pengembangan ikan-ikan spesifik lokal Sertifikat tanah Nomor.18/GS.N0.921/15 Tahun 1983.

2. Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018.

No	Uraian	2019	2018
1.	ASET		
2.	ASET LANCAR		
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
4.	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
5.	Piutang Pajak	0	0
6.	Piutang Retribusi	0	0
7.	Beban di Bayar di muka	2.137.417,95	2.322.102,43
8.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
9.	Penyisihan Piutang	0	0
10.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0	0
11.	Piutang Lainnya	0	0
12.	Persediaan	377.974.212,65	182.886.063,00
13.	JUMLAH ASET LANCAR	380.111.630,60	185.208.165,43
14.	ASET TETAP		
15.	Tanah	266.828.849,00	266.828.849,00
16.	Peralatan dan Mesin	3.354.311.662,00	3.362.946.662,00
17.	Gedung dan Bangunan	21.140.820.296,92	19.936.956.012,92
18.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	0
19.	Aset Tetap lainnya	231.565.166,00	0

20.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
21.	Akumulasi Penyusutan	-6.615.034.590,00	-6.659.919.590,00
22.	JUMLAH ASET TETAP	18.378.491.383,92	16.906.811.933,92
23.			
24.	ASET LAINNYA		
25.	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
26.	Tuntutan Ganti Rugi	0	0
27.	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0
28.	Aset Tak Berwujud	0	0
29.	Aset Lain-lain	2.640.000,00	2.640.000,00
30.	JUMLAH ASET LAINNYA	2.640.000,00	2.640.000,00
31.	JUMLAH ASET	18.761.243.014,52	17.094.660.099,35
32.			
33.	KEWAJIBAN		
34.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
35.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
36.	Pendapatan Diterima dimuka	0	0
37.	Utang Belanja	0	0
38.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
39.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	0
40.	JUMLAH KEWAJIBAN	0	0
41.			
42.	EKUITAS		
43.	Ekuitas	-3.762.233.652,40	-1.570.135.649,57
44.	RK PPKD	22.523.476.666,92	18.664.795.748,92
45.	Jumlah ekuitas	18.761.243.014,52	17.094.660.099,35
46.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18.761.243.014,52	17.094.660.099,35

3. Sumber Daya Manusia UPT-PBAPL berdasarkan Pendidikan, Pangkat/Gol.ruang dan Jabatan Struktural dan Fungsional.

a) Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	-
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	9
4.	Diploma Tiga (D-III)	3
5.	Diploma Empat (D-IV)	1
6.	Sarjana (S-1)	6
	Jumlah	21

b) Pangkat Golongan

No	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah
1.	Pengatur Muda (II/a)	1
2.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-
3.	Pengatur (II/c)	9
4.	Pengatur Muda Tk.I (II/d)	1
5.	Penata Muda (III/a)	-
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	3
7.	Penata (III/c)	2
8.	Penata Tk.I (III/d)	4
9.	Pembina (IV/a)	1
	Jumlah	21

c) Pejabat Struktural dan Fungsional (ASN)

No	Nama Jabatan	Jlh	Pemegang Jabatan
1.	Eselon III.b/ Administrator Kepala UPT	1	Donatus,S.Pi.
2.	Eselon IV.a / Pengawas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.	1	Tobias, SE.
	Pelaksana :		
	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan.	1	Aulia Rahman
	Bendahara	2	Subandi,A.Md. Bahrul Muhit
	Pengelola Keuangan	1	Hendra Suryono
	Pengelola Barang Milik Negara	2	Suheri Solichin Nuzul
	Pengadministrasi Umum	2	Asih Yuliawati. Supinah
	Pengadministrasi Persuratan	1	Sarnata
3.	Eselon IV.a / Pengawas Kasi Produksi dan Distribusi	1	Eka Ratuningsih,S.Pi.
	Pelaksana :		
	Analisis Budidaya Perikanan	1	Saifullah Siregar,S.St.Pi.
	Pengelola Teknologi Perbenihan	2	Turno Ahmad Dani
	Pramu Benih Ikan	1	Supriadi
4.	Eselon IV.a / Pengawas Kasi Pelayanan Jasa Teknologi	1	Saidi,SP.
	Pelaksana :		
	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	M.Hariansyah,S.Pi.
	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	Syafrudin
5.	Jabatan Fungsional :		
	Ketrampilan :		
	Pengawas Perikanan Terampil	2	Juano Pontira Apriliandi,A.Md Sepri Maradona,A.Md
J U M L A H		21	

d) Daftar Nama Pegawai Non PNS Lingkup UPT-PBAPL.

No (1)	Nama (2)	Pendidikan (3)	Jabatan/Tugas (4)
1.	Dony Extrada	SMA	Petugas Keamanan (SATPAM)
2.	Hendro	SMA	Petugas Keamanan (SATPAM)
3.	Urai Heri Julianto	SMA	Petugas Keamanan (SATPAM)
4.	Abi Sartono	S.1.	Petugas Keamanan (SATPAM)
5.	Alipin	SMK Perikanan	Pramu Benih Ikan
6.	Muhammad Daud	SPP-SUPM	Pramu Benih Ikan
7.	Muhammad Ali	SPP-SUPM	Pramu Benih Ikan
8.	Wirayuda,SE.	S.1	Pengelola Keuangan
9.	Sarkomin	SMP	Pramu Benih Ikan
10.	Jumadi,A.Md	D.III Perikanan	Pengelola Teknologi Perbenihan
11.	Andi	SPP-SUPM	Pramu Benih Ikan
12.	Heriyanto,A.Md	D.III Polnep	Pengelola Teknologi Perbenihan
13.	Syech Deni	SMK Perikanan	Pramu Benih Ikan
14.	Munarto Projo	SMA	Pramu Benih Ikan

3. Analisis Jabatan UPT-PBAPL Tahun 2019. (terlampir)

4. Kapasitas Target Produksi Benur/Ikan per Tahun.

No	Jenis Komoditas	Kapasitas Produksi (Kg/Ekor)	
		Benih	Pembesaran
1	Udang Windu	6,630,000.00	1,200.00
2	Udang Vannamei	4,284,000.00	1,200.00
3	Nila Salin	765,000.00	810.00
4	Bandeng	765,000.00	
5	Jelawat	500,000.00	
6	Gurami	100,000.00	
7	Tengadak	200,000.00	
8	Biawan	150,000.00	
9	Induk Ikan Lele		2,400.00
10	Induk Ikan Mas		2,400.00
11	Induk Ikan Nila		1,780.00
Jumlah		12.594.000 Ekor	9.750 Kg

5. Target Siklus Produksi / Tahun.

No	Jenis Komoditas	Siklus Produksi/tahun	
		Benih	Pembesaran
1	Udang Windu	6	2
2	Udang Vannamei	6	2
3	Nila Salin	4	2
4	Bandeng	6	
5	Jelawat	4	
6	Gurami	4	
7	Tengadak	4	
8	Biawan	4	
9	Induk Ikan Lele	2	
10	Induk Ikan Mas	1	
11	Induk Ikan Nila	2	
Jumlah		43 Siklus	6 Siklus

6. Perkiraan Prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Tahun Kedepan (2021 – 2025)

Apabila UPT – Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut mengelola kewenangan komoditas Ikan/Udang Air Tawar, Payau dan Laut dan memperhitungkan prasaran budidaya yang dimiliki, maka dapat diperkirakan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

No.	Jenis Komoditas	Target Produksi (Kg/Ekor)			Harga /ekor/ kg (Rp)	Jumlah (Rp)
		Benih	Induk /Calon Induk	Pembesaran		
1	Udang Windu	6,630,000		1200	25,000	43.758.000
2	Udang Vannamei	4,284,000		1200	25,000	28.274.400
4	Nila Salin	765.000		810	16,000	11.475.000
5	Bandeng	765.000			22	5.049.000
8	Jelawat	500,000			90	22.500.000
9	Gurame	100,000			100	5.000.000
10	Tengadak	200,000			90	9.000.000

11	Biawan	150,000			90	6.750.000
12	Induk Ikan Lele Jantan		1,200		70,000	84.000.000
13	Induk Ikan Lele Betina		1,200		70,000	84.000.000
14	Induk Ikan Nila Jantan		580		45,000	26.100.000
15	Induk Ikan Nila Betina		1,200		45,000	54.000.000
16	Induk Ikan Mas Jantan		1,200		40,000	48.000.000
17	Induk Ikan Mas Betina		1,200		45,000	54.000.000
Jumlah		12.594.000 Ekor	6.380 kg	3.210 Kg		503.794.400
TOTAL PAD						503.794.400

Keterangan :

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor.10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

7. Sarana dan Prasarana

LOKASI SEDAU



Kantor



Mess



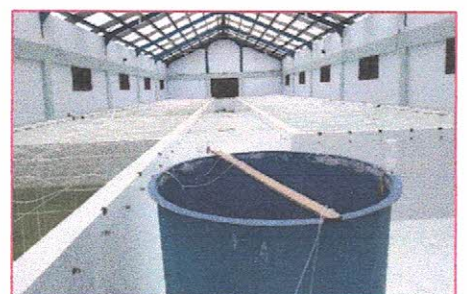
Rumah Dinas



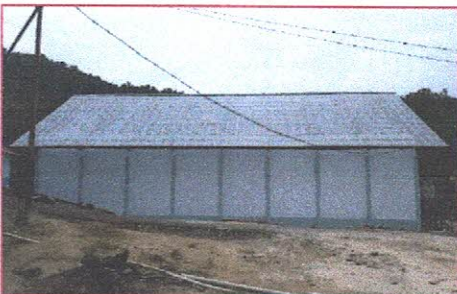
Rumah Dinas



Hatchery Udang Vannamei



Indoor Hatchery Udang Vannamei



Hatchery Udang Windu



Indoor Hatchery Udang Windu



Bak Penampungan Air Laut



Rumah Induk Udang



Bangsai Packing



Bak Pemijahan & Pendederan Nila Salin

Instalasi Tambak di Sebangkau



Kondisi Awal Lahan Tambak



Lahan Tambak



Tebar Perdana Ikan Nila Salin



Tebar Perdana Ikan Nila Salin



Panen Perdana Ikan Nila Salin



Tebar Perdana Udang Windu

Instalasi Pengembangan Ikan Spesifik Lokal di Anjongan dan di Mempawah



Lahan Anjongan



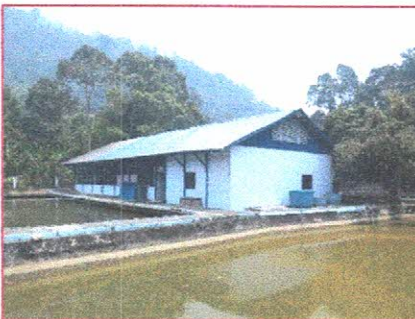
Kolam Pendederan



Kantor di Anjongan



Aula



Heatchery



Ruang Packing



Karamba di Mempawah



Pakar & Teknisi Karamba di Mempawah

VI. KESIMPULAN

1. Ketersediaan Benih Ikan/Udang Air Tawar, Payau dan Laut, serta ikan air tawar Spesifik lokal menciptakan “Multifier Effect” perekonomian masyarakat di bidang budidaya dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat.
2. Keberadaan UPT - Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT - PBAPL) Provinsi Kalimantan Barat, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui kegiatan rutin maupun program pembangunan mempunyai tugas “Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dibidang perikanan budidaya air payau dan laut serta ikan-ikan spesifik lokal guna mendukung pemenuhan benih ikan / udang payau laut, ikan spesifik lokal guna mendukung benih ikan/udang Air Tawar, Payau Laut dan Ikan Air Tawar Spesifik Lokal bagi Masyarakat Pembudidaya di Provinsi Kalimantan Barat.

VII. SARAN

1. Guna Optimalisasi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan Perubahan Nomenklatur dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi sesuai Perundang – undangan yang berlaku dan beban Nomenklatur mencerminkan Kekuatan mengelola Ikan Air Tawar, Payau dan Laut.
2. UPT - Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT - PBAPL) Provinsi Kalimantan Barat, strategis Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Oleh Karena itu Keberadaannya dianggap perlu Untuk dipertahankan.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan atas perhatian Bapak kami diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



IR. HENY HERAWATI, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 2003